

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asnawi, M. Natsir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta.
- Faudy, Munir, 2010, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lontoh, Rudhy A., et al, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, ed. Ke-3 cet. Ke 1, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasir, Muhammad, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Cet. II, Djambatan, Jakarta.
- Pramono, Nindy, dan Sularto, 2017, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Salim, M.S, 2010, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Soepomo, R., 1994, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri cet.13*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soeroso, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed.1. Cetakan kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Sulaiman, Robinton dan Joko Prabowo, 2000, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan (Tinjauan Yuridis: Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang 80 Saham Terhadap Perusahaan Pailit)*, Karawaci, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan*, Ed. 2, PT Sofmedia, Jakarta.
- Sutiarso, Cicut, 2011, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Yasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Suyudi, Aria, Eryanto Nugroho, Herni Sri Nurbayanti, 2004, *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia: Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2010, *Hukum Kepailitan Memahami Undang–Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti Jakarta.
- , 2004, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissement Verordening Juncto Undang – Undang No. 4 Tahun 1998*, Grafiti, Jakarta.
- , 2002, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijayanta, Tata dan Muhammad Bagas A.H, 2021, *Cross Border Insolvency, Kerja Sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wijayanta, Tata, 2016, *Undang–Undang dan Praktik Kepailitan Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah, 2018, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

Fitriati, Sufiarina and Efa Laela Fakhriah, “Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia”, *Masalah-Masalah Hukum*, Universitas Tamansiswa Padang, Vol. 43, No. 4, 2014, hlm. 560-575.

Hadiwardoyo, Wibowo, “Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19”, *Journal of Business and Entrepreneurship*, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol. 2, No. 2, April 2020, hlm. 83-92.

Haq, M. Bagas Amirul, dan Tata Wijayanta, “Recognition of Foreign Insolvency Proceedings: A Comparative Study between the Laws of Indonesia and South Korea” *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, IJICC Australia, Vol. 14, Issue 12, 2020, hlm. 715-729.

Nisa’ Cholifatun, “Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hal debitornya Perseroan Terbatas”, *Jurist-Diction*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Volume 2, Nomor 2, Maret 2019, hlm. 415 – 433.

S, Ellyana, 1998, “Proses/Cara Mengajukan dan Penyelesaian Rencana Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran”, *Makalah* disampaikan dalam Lokakarya Undang – Undang Kepailitan, Jakarta.

Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto, Vol. 14, No. 2, Mei 2014, hlm. 216-226.

Wijayanta, Tata, “Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Vol. 26, No. 1, Februari 2014, hlm. 1-13.

Hasil Penelitian

Anggraini, Novi Dwi, 2020, Tinjauan Yuridis Atas Pembatalan Perdamaian Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan debitor (Studi Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 1/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby Juncto Nomor: 5/Pdt.Sus-

PKPU/2014/PN Niaga Sby), *Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Nora, Silfia Afria, 2020, Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Harta Kekayaan debitor PT. Stareast Sejahtera Group (Studi: Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/Pn Niaga.Mdn. Jo. Nomor 11/Pdt.Sus-Pkpu/2017/PN Niaga.Mdn.), *Tesis*, Tidak dipublikasikan, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Nur, Aspian, 2006, “Perdamaian dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Timotius, Naskel Thiopulus Baharsyah, 2021, Analisis Perbandingan Putusan Hakim Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tentang Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat Perdamaian Ditinjau Dari Pasal 281 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 6/Pdt.Sus-Pkpu/2019/Pn.Niaga. Mdn. Dan Putusan No. 119/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn. Niaga.Jkt.Pst), *Tesis*, Tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta.

Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2019, KBBI Daring, dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/perdamaian> diakses pada tanggal 27 Februari 2023.

Susanto, Vendy Yhulia, “Sepanjang Tahun 2021, Jumlah Perkara PKPU Meningkat”, <https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-tahun-2021-jumlah-perkara-pkpu-meningkat>, diakses pada tanggal 3 September 2022.

Sutiawan, Iwan, “KKI: Perkara Kepailitan dan PKPU Melonjak Lebih dari 100%”, <https://www.gatra.com/news-542417-hukum-kki-perkara-kepailitan-dan-pkpu-melonjak-lebih-dari-100.html>, diakses pada tanggal 3 September 2022.

Universitas Islam Indonesia, “Dampak Pandemi Covid-19 di Bidang Sosial dan Hukum”, <https://www.uii.ac.id/dampak-pandemi-covid-19-di-bidang-sosial-dan-hukum/>, diakses pada tanggal 3 September 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. *jo.* Nomor 118/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.JktPst, *jo.* Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst